



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 41 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 02 Tahun 2010 dipandang masih memerlukan perubahan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara yang dimaksud dengan ;

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan dinas keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kabupaten, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas ke tempat yang harus dikunjungi keluar negeri dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara/Daerah.
4. Real Cost adalah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga.
5. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
6. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas atau per hari.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah kepada Pejabat Negara atau Pegawai Negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
8. Sopir adalah pengendara kendaraan Dinas yang berstatus PNS maupun Tenaga Honorer.

## **Pasal 2**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya.

## **BAB II**

### **JENIS PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

Perjalanan Dinas meliputi :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten Mamuju Utara).

#### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Pasangkayu) ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sulawesi Barat dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara dari tempat kedudukan (bertugas) ke tempat yang dituju di dalam Daerah Kabupaten Mamuju utara dan kembali ke tempat kedudukan semula dan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Pasangkayu) ke tempat yang dituju di dalam Provinsi Sulawesi Barat dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.

## **BAB III**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 8 tingkatan yaitu :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil bupati;
  - c. Eselon II.a;
  - d. Eselon II.b;
  - e. Eselon III.a;
  - f. Eselon III.b;
  - g. Eselon IV.a;
  - h. Eselon IV.b;
  - i. Eselon V Non Eselon, Golongan IV dan III;
  - j. Non Eselon Golongan I & II;
  - k. Sopir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Non Eselon hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya Transportasi Udara;
  - b. Biaya Transportasi Darat/Bahan Bakar Mobil/Motor Dinas;
  - c. Uang Harian :

- Uang Saku;
  - Uang Makan;
  - Uang Penginapan ;
- d. Transportasi Lokal;
- e. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, dibayarkan secara real coast/sesuai dengan harga.
- (3) Rincian biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 7**

Dalam hal Pejabat atau staf dalam melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/workshop yang membebankan biaya kontribusi maka uang makan dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c tidak diberikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud.

#### **Pasal 8**

- (1) Satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan harga tiket dari model transport yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya transportasi/Bahan Bakar untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, jika menggunakan kendaraan dinas dihitung berdasarkan jarak antara Kabupaten tempat kedudukan dengan Kabupaten tujuan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis kendaraan (volume mesin / cc);
- (3) Satuan Uang Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan pada perjalanan dinas diluar daerah bagi Pejabat yang tanpa menggunakan kendaraan dinas;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas membutuhkan bahan bakar melebihi satuan biaya perjalanan maka biaya bahan bakar dihitung berdasarkan jarak antara tempat kedudukan dan tempat tujuan dengan memperhatikan harga BBM setempat.

#### **Pasal 9**

- (1) Satuan Uang Representasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada pejabat dan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang Representasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Pasal 11**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumsum sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, kecuali biaya transportasi.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas tersebut selesai dilaksanakan.
- (3) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati.

- (4) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Asisten dan staf Ahli diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III, IV, V dan Staf diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

#### **Pasal 12**

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Mamuju Utara.
- (2) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati.
- (3) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati.
- (4) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b.
- (5) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus diterbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (4) Jika dikemudian ternyata bahwa jumlah hari sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

#### **Pasal 14**

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPPD harus secara jelas dicatat :
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi ; dan,
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada

- bendaharawan yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggung .
- (5) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk tiket dan boarding pass yang telah dipergunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut.
  - (6) Setiap hasil perjalanan dinas Kepala Satuan Kerja harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretrais Daerah;
  - (7) Setiap hasil Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, V dan Non Eselon harus dilaporkan kepada Pimpinan Satuan Kerja masing - masing dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (8) Pada dasarnya Pertanggung Jawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan kondisi tertentu/keadaan mendesak/ darurat diperbolehkan mempergunakan tiket nama orang lain.
- (2) Kelas bisnis hanya bolehkan/dibenarkan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju Utara ini dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju utara.
- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa ;
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan/atau;
  - b. Hukuman Administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **P E N U T U P**

#### **Pasal 17**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

#### **Pasal 18**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan

Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Negeri Sipil calon dan pegawai tidak tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 dan ketetapan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : ~~23 DESEMBER~~ 2010

**BUPATI MAMUJU UTARA**

ttd

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : \_\_\_\_\_ 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. NUR ALAM TAHIR, SH.M.Pd**  
(BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR     )

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	UANG REPRE SENTASI / HARI	BIAYA TRANS- PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT BBM MOBIL DINAS		
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN				1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara									
- Dapurang	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	600.000
- Sarudu	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	550.000
- Doripoku	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	550.000
- Bulu Taba	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	550.000
- Baras	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	500.000
- Lariang	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	450.000
- Tikke Raya	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Pedongga	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	375.000
- Pasangkayu	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	350.000
- Bambalamotu	260.000	520.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Bambaira	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	450.000
- Sarjo	260.000	520.000	260.000	-	-	-	-	-	500.000
Donggala	325.000	650.000	500.000	-	-	-	-	-	600.000
Palu	325.000	650.000	850.000	-	350.000	-	-	-	775.000
Mamuju	325.000	650.000	660.000	-	350.000	-	-	-	1.290.000
Majene	325.000	650.000	455.000	-	350.000	-	-	-	1.680.000
Polman	325.000	650.000	455.000	-	350.000	-	-	-	1.800.000
Mamasa	325.000	650.000	455.000	-	350.000	-	-	-	1.920.000
Pinrang	325.000	650.000	455.000	-	350.000	-	-	-	1.920.000
Makassar	390.000	780.000	1.000.000	780.000*)	350.000	Real cost	-	-	2.700.000
Manado	390.000	780.000	1.000.000	780.000*)	350.000	Real cost	-	-	4.140.000
Kendari	325.000	780.000	770.000	780.000*)	350.000	Real cost	-	-	-
Gorontalo	325.000	780.000	1.000.000	780.000*)	350.000	Real cost	-	-	2.820.000
II. JAWA									
Jakarta	455.000	1.300.000	1.100.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Surabaya	455.000	1.300.000	1.050.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Jogjakarta	455.000	1.300.000	1.020.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Bandung	455.000	1.300.000	1.020.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Solo	455.000	1.300.000	1.020.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Bali	455.000	1.300.000	1.250.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Lombok	455.000	1.300.000	1.000.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	390.000	1.300.000	1.040.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Palangkaraya	390.000	1.300.000	1.040.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Banjarmasin	390.000	1.300.000	1.040.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Pontianak	390.000	1.300.000	1.040.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	390.000	1.300.000	1.400.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Medan	390.000	1.300.000	1.050.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Batam	455.000	1.300.000	1.050.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Palembang	390.000	1.300.000	1.050.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
Lampung	390.000	1.300.000	1.050.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
V. MALUKU	455.000	1.300.000	1000.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-
VI. PAPUA	455.000	1.300.000	1.230.000	1.430.000	350.000	Real cost	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

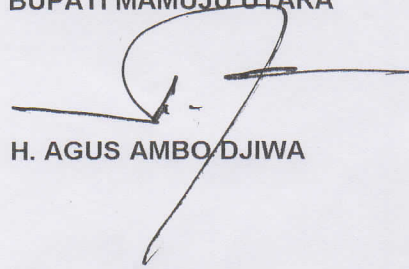
NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

WAKIL BUPATI	UANG HARIAN			TRANS- PORTASI LOKAL	UANG REPRE SENTASI / HARI	BIAYA TRANS- PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT BBM MOBIL DINAS		
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN				1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	600.000
- Sarudu	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	550.000
- Doripoku	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	550.000
- Bulu Taba	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	550.000
- Baras	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	500.000
- Lariang	195.000	390.000	-	-	-	-	-	-	450.000
- Tikke Raya	195.000	390.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Pedongga	195.000	390.000	-	-	-	-	-	-	375.000
- Pasangkayu	195.000	390.000	-	-	-	-	-	-	350.000
- Bambalamotu	195.000	390.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Bambaيرا	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	450.000
- Sarjo	195.000	390.000	227.500	-	-	-	-	-	500.000
Donggala	292.500	390.000	450.000	-	-	-	-	-	600.000
Palu	292.500	390.000	800.000	-	300.000	-	-	-	775.000
Mamuju	292.500	390.000	600.000	-	300.000	-	-	-	1.290.000
Majene	292.500	390.000	400.000	-	300.000	-	-	-	1.680.000
Polman	292.500	390.000	400.000	-	300.000	-	-	-	1.800.000
Mamasa	292.500	390.000	400.000	-	300.000	-	-	-	1.920.000
Pinrang	292.500	390.000	400.000	-	300.000	-	-	-	1.920.000
Makassar	325.000	520.000	1.000.000	455.000	300.000	Real cost	-	-	2.700.000
Manado	325.000	520.000	1.000.000	455.000	300.000	Real cost	-	-	4.140.000
Kendari	325.000	520.000	700.000	455.000	300.000	Real cost	-	-	-
Gorontalo	325.000	520.000	1.000.000	455.000	300.000	Real cost	-	-	2.820.000
II. JAWA									
Jakarta	390.000	1.040.000	1.100.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Surabaya	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Jogjakarta	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Bandung	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Solo	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Bali	390.000	1.040.000	1.250.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Lombok	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	325.000	1.040.000	1.040.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Palangkaraya	325.000	1.040.000	950.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Banjarmasin	325.000	1.040.000	950.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Pontianak	325.000	1.040.000	950.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	325.000	1.040.000	1.200.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Medan	325.000	1.040.000	1.040.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Batam	390.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Palembang	325.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
Lampung	325.000	1.040.000	1.000.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
V. MALUKU	325.000	1.040.000	975.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-
VI. PAPUA	325.000	1.040.000	1.230.000	1.170.000	300.000	Real cost	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA


  
H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

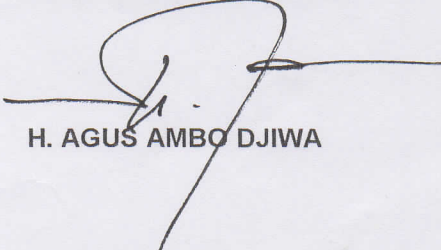
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON II.A	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	UANG REPRE SENTASI / HARI	BIAYA TRANS- PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT BBM MOBIL DINAS		
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN				1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	600.000
- Sarudu	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	550.000
- Doripoku	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	550.000
- Bulu Taba	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	550.000
- Baras	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	500.000
- Lariang	162.500	325.000	-	-	-	-	-	-	450.000
- Tikke Raya	162.500	325.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Pedongga	162.500	325.000	-	-	-	-	-	-	375.000
- Pasangkayu	162.500	325.000	-	-	-	-	-	-	350.000
- Bambalamotu	162.500	325.000	-	-	-	-	-	-	400.000
- Bambaira	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	450.000
- Sarjo	162.500	325.000	195.000	-	-	-	-	-	500.000
Donggala	195.000	325.000	400.000	-	-	-	-	-	600.000
Palu	260.000	325.000	550.000	-	250.000	-	-	-	775.000
Mamuju	260.000	325.000	550.000	-	250.000	-	-	-	1.290.000
Majene	260.000	325.000	350.000	-	250.000	-	-	-	1.680.000
Polman	260.000	325.000	350.000	-	250.000	-	-	-	1.800.000
Mamasa	260.000	325.000	350.000	-	250.000	-	-	-	1.920.000
Pinrang	260.000	325.000	350.000	-	250.000	-	-	-	1.920.000
Makassar	270.000	390.000	790.000	390.000*)	250.000	Real cost	-	-	2.700.000
Manado	270.000	390.000	650.000	390.000*)	250.000	Real cost	-	-	4.140.000
Kendari	270.000	390.000	585.000	390.000*)	250.000	Real cost	-	-	-
Gorontalo	270.000	390.000	820.000	390.000*)	250.000	Real cost	-	-	2.820.000
II. JAWA									
Jakarta	325.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Surabaya	325.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Jogjakarta	325.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Bandung	325.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Solo	325.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Bali	325.500	910.000	1.200.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Lombok	325.500	910.000	900.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	292.500	910.000	1.000.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Palangkaraya	292.500	910.000	845.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Banjarmasin	292.500	910.000	845.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Pontianak	292.500	910.000	845.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	292.500	910.000	1.140.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Medan	292.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
2. Batam	292.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Palembang	292.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
Lampung	292.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
V. MALUKU	292.500	910.000	910.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-
VI. PAPUA	292.500	910.000	930.000	1.105.000	250.000	Real cost	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA

  
H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

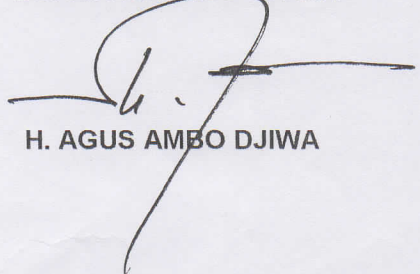
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON II.B	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	UANG REPRE SENTASI / HARI	TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT BBM MOBIL DINAS		
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN				1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	157.500	169.000	162.500	-	-	-	310.000	390.000	600.000
- Sarudu	157.500	169.000	162.500	-	-	-	270.000	350.000	550.000
- Doripoku	157.500	169.000	162.500	-	-	-	270.000	350.000	550.000
- Bulu Taba	157.500	169.000	162.500	-	-	-	270.000	350.000	550.000
- Baras	157.500	169.000	162.500	-	-	-	240.000	310.000	500.000
- Lariang	157.500	169.000	-	-	-	-	210.000	270.000	450.000
- Tikke Raya	157.500	169.000	-	-	-	-	180.000	240.000	400.000
- Pedongga	157.500	169.000	-	-	-	-	150.000	200.000	375.000
- Pasangkayu	157.500	169.000	-	-	-	-	130.000	150.000	350.000
- Bambalamotu	157.500	169.000	-	-	-	-	180.000	240.000	400.000
- Bambaira	157.500	169.000	162.500	-	-	-	210.000	270.000	450.000
- Sarjo	157.500	169.000	162.500	-	-	-	240.000	310.000	500.000
Donggala	180.000	227.500	350.000	-	-	-	245.000	305.000	600.000
Palu	195.000	260.000	500.000	-	200.000	-	335.000	420.000	775.000
Mamuju	195.000	240.000	500.000	-	200.000	-	900.000	1.030.000	1.290.000
Majene	195.000	240.000	325.000	-	200.000	-	1.105.000	1.230.000	1.680.000
Polman	195.000	240.000	325.000	-	200.000	-	1.105.000	1.525.000	1.800.000
Mamasa	195.000	240.000	325.000	-	200.000	-	1.105.000	1.620.000	1.920.000
Pinrang	227.500	240.000	325.000	-	200.000	-	1.105.000	1.525.000	1.920.000
Makassar	227.500	325.000	760.000	325.000*)	200.000	Real cost	1.945.000	2.400.000	2.700.000
Manado	227.500	325.000	600.000	325.000*)	200.000	Real cost	3.505.000	4.545.000	4.140.000
Kendari	227.500	325.000	520.000	325.000*)	200.000	Real cost	-	-	-
Gorontalo	227.500	325.000	750.000	325.000*)	200.000	Real cost	2.335.000	3.025.000	2.820.000
II. JAWA									
Jakarta	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Surabaya	260.000	780.000	700.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Jogjakarta	260.000	780.000	700.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Bandung	260.000	780.000	700.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Solo	260.000	780.000	700.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Bali	260.000	780.000	1.000.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Lombok	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	260.000	780.000	900.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Palangkaraya	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Banjarmasin	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Pontianak	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	260.000	780.000	1.000.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Medan	260.000	780.000	750.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Batam	260.000	780.000	750.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Palembang	260.000	780.000	750.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
Lampung	260.000	780.000	750.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
V. MALUKU	260.000	780.000	700.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-
VI. PAPUA	260.000	780.000	800.000	1.040.000	200.000	Real cost	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA

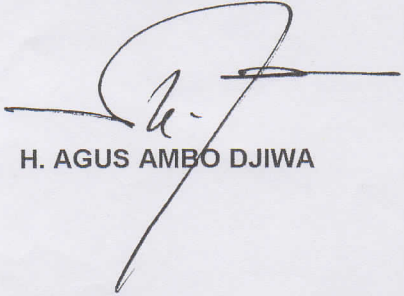


H. AGUS AMBO DJIWA

ESELON III. A	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			KENDARAAN UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN			MOBIL DINAS		(BAHAN BAKAR)	
						1.200-1500 cc	1.501-2.500 cc		
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara									
- Dapurang	147.500	147.500	147.500	-	-	310.000	390.000	600.000	185.000
- Sarudu	147.500	147.500	147.500	-	-	270.000	350.000	550.000	165.000
- Doripoku	147.500	147.500	147.500	-	-	270.000	350.000	550.000	165.000
- Bulu Taba	147.500	147.500	147.500	-	-	270.000	350.000	550.000	165.000
- Baras	147.500	147.500	147.500	-	-	240.000	310.000	500.000	145.000
- Lariang	147.500	147.500	-	-	-	210.000	270.000	450.000	125.000
- Tikke Raya	147.500	147.500	-	-	-	180.000	240.000	400.000	105.000
- Pedongga	147.500	147.500	-	-	-	150.000	200.000	375.000	95.000
- Pasangkayu	147.500	147.500	-	-	-	130.000	150.000	350.000	85.000
- Bambalamotu	147.500	147.500	-	-	-	180.000	240.000	400.000	105.000
- Bambaira	147.500	147.500	147.500	-	-	210.000	270.000	450.000	125.000
- Sarjo	147.500	147.500	147.500	-	-	240.000	310.000	500.000	145.000
Donggala	170.000	162.55	250.000	295.500*)	-	245.000	306.000	600.000	225.000
Palu	180.000	245.000	440.000	292.500*)	-	336.000	420.000	774.000	310.000
Mamuju	180.000	235.000	440.000	292.500*)	-	900.000	1.032.000	1.290.000	450.000
Majene	180.000	235.000	300.000	292.500*)	-	1.104.000	1.230.000	1.680.000	555.000
Polman	180.000	235.000	300.000	292.500*)	-	1.104.000	1.524.000	1.800.000	575.000
Mamasa	180.000	235.000	300.000	292.500*)	-	1.104.000	1.620.000	1.920.000	575.000
Pinrang	212.500	235.000	300.000	292.500*)	-	1.104.000	1.524.000	1.920.000	580.000
Makassar	212.500	260.000	750.000	292.500*)	Real cost	1.944.000	2.400.000	2.700.000	840.000
Manado	212.500	260.000	575.000	292.500*)	Real cost	3.504.000	4.542.000	4.140.000	1.290.000
Kendari	212.500	260.000	440.000	292.500*)	Real cost	-	-	-	-
Gorontalo	212.500	260.000	660.000	292.500*)	Real cost	2.335.000	3.025.000	2.820.000	1.198.000
II. JAWA									
Jakarta	245.000	650.000	600.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Surabaya	245.000	650.000	520.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Jogjakarta	245.000	650.000	520.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Bandung	245.000	650.000	520.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Solo	245.000	650.000	520.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Bali	245.000	650.000	935.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
Lombok	245.000	650.000	520.000	975.000	Real cost	-	-	-	-
III. KALIMANTAN					Real cost				
Samarinda	245.000	650.000	455.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Palangkaraya	245.000	650.000	455.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Banjarmasin	245.000	650.000	455.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Pontianak	245.000	650.000	455.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	245.000	650.000	760.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Medan	245.000	650.000	550.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Batam	245.000	650.000	550.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Palembang	245.000	650.000	550.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
Lampung	245.000	650.000	550.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
V. MALUKU	245.000	650.000	600.000	910.000	Real cost	-	-	-	-
VI. PAPUA	245.000	650.000	700.000	910.000	Real cost	-	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA


  
H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

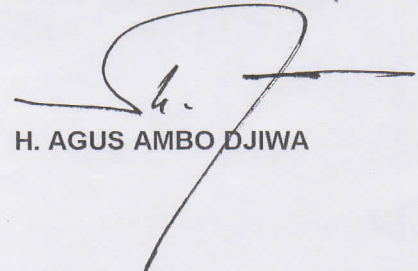
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON III. B	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN			MOBIL DINAS (BAHAN BAKAR)			KENDARAAN UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
						1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc	
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
<b>I. PULAU SULAWESI</b>									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	130.000
- Sarudu	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	110.000
- Doripoku	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	110.000
- Bulu Taba	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	110.000
- Baras	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	90.000
- Lariang	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	85.000
- Tikke Raya	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	80.000
- Pedongga	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	70.000
- Pasangkayu	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	60.000
- Bambalamotu	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	70.000
- Bambaira	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	80.000
- Sarjo	137.500	137.500	137.500	-	-	-	-	-	90.000
Donggala	162.500	147.500	240.000	235.000 *)	-	-	-	-	130.000
Palu	170.000	235.000	370.000	235.000 *)	-	-	-	-	195.000
Mamuju	170.000	180.000	370.000	235.000 *)	-	-	-	-	390.000
Majene	170.000	180.000	290.000	235.000 *)	-	-	-	-	450.000
Polman	170.000	180.000	290.000	235.000 *)	-	-	-	-	485.000
Mamasa	170.000	180.000	290.000	235.000 *)	-	-	-	-	486.000
Pinrang	170.000	180.000	290.000	235.000 *)	-	-	-	-	515.000
Makassar	202.500	235.000	465.000	267.500 *)	Real cost	-	-	-	775.000
Manado	202.500	235.000	440.000	267.500 *)	Real cost	-	-	-	1.040.000
Kendari	202.500	235.000	400.000	267.500 *)	Real cost	-	-	-	
Gorontalo	202.500	235.000	425.000	267.500 *)	Real cost	-	-	-	900.000
<b>II. JAWA</b>									
Jakarta	235.000	462.500	510.000	820.000	Real cost	-	-	-	-
Surabaya	235.000	462.500	462.500	690.000	Real cost	-	-	-	-
Jogjakarta	235.000	462.500	462.500	690.000	Real cost	-	-	-	-
Bandung	235.000	462.500	462.500	690.000	Real cost	-	-	-	-
Solo	235.000	462.500	462.500	690.000	Real cost	-	-	-	-
Bali	235.000	462.500	810.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Lombok	235.000	462.500	462.500	690.000	Real cost	-	-	-	-
<b>III. KALIMANTAN</b>									
Samarinda	235.000	462.500	365.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Palangkaraya	235.000	462.500	365.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Banjarmasin	235.000	462.500	365.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Pontianak	235.000	462.500	365.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
<b>IV. SUMATERA</b>									
Aceh	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Medan	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Batam	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Palembang	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
Lampung	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
<b>V. MALUKU</b>	235.000	462.500	405.000	690.000	Real cost	-	-	-	-
<b>VI. PAPUA</b>	235.000	462.500	415.000	690.000	Real cost	-	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

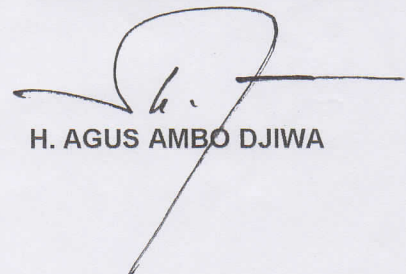
NOMOR : **AI** TAHUN 201**0**

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON IV . A	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN			MOBIL DINAS (BAHAN BAKAR)			KENDARAAN UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
						1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
<b>I. PULAU SULAWESI</b>									
Mamuju Utara									
- Dapurang	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	120.000
- Sarudu	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	100.000
- Doripoku	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	100.000
- Bulu Taba	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	100.000
- Baras	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	80.000
- Lariang	127.500	127.500	-	-	-	-	-	-	75.000
- Tikke Raya	127.500	127.500	-	-	-	-	-	-	70.000
- Pedongga	127.500	127.500	-	-	-	-	-	-	65.000
- Pasangkayu	127.500	127.500	-	-	-	-	-	-	60.000
- Bambalamotu	127.500	127.500	-	-	-	-	-	-	65.000
- Bambaira	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	70.000
- Sarjo	127.500	127.500	127.500	-	-	-	-	-	75.000
Donggala	160.000	127.500	230.000	225.000 *)	-	-	-	-	120.000
Palu	160.000	225.000	360.000	225.000 *)	-	-	-	-	190.000
Mamuju	160.000	160.000	360.000	225.000 *)	-	-	-	-	380.000
Majene	160.000	160.000	280.000	225.000 *)	-	-	-	-	440.000
Polman	160.000	160.000	280.000	225.000 *)	-	-	-	-	470.000
Mamasa	160.000	160.000	280.000	225.000	-	-	-	-	470.000
Pinrang	160.000	160.000	280.000	225.000	-	-	-	-	500.000
Makassar	192.500	225.000	455.000	257.500 *)	Real cost	-	-	-	750.000
Manado	192.500	225.000	430.000	257.500 *)	Real cost	-	-	-	1.030.000
Kendari	192.500	225.000	390.000	257.500 *)	Real cost	-	-	-	-
Gorontalo	192.500	225.000	415.000	257.500 *)	Real cost	-	-	-	900.000
<b>II. JAWA</b>									
Jakarta	225.000	452.500	500.000	810.000	Real cost	-	-	-	-
Surabaya	225.000	452.500	452.500	680.000	Real cost	-	-	-	-
Jogjakarta	225.000	452.500	452.500	680.000	Real cost	-	-	-	-
Bandung	225.000	452.500	452.500	680.000	Real cost	-	-	-	-
Solo	225.000	452.500	452.500	680.000	Real cost	-	-	-	-
Bali	225.000	452.500	800.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Lombok	225.000	452.500	452.500	680.000	Real cost	-	-	-	-
<b>III. KALIMANTAN</b>									
Samarinda	225.000	452.500	355.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Palangkaraya	225.000	452.500	355.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Banjarmasin	225.000	452.500	355.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Pontianak	225.000	452.500	355.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
<b>IV. SUMATERA</b>									
Aceh	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Medan	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Batam	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Palembang	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
Lampung	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
<b>V. MALUKU</b>	225.000	452.500	395.000	680.000	Real cost	-	-	-	-
<b>VI. PAPUA</b>	225.000	452.500	405.000	680.000	Real cost	-	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

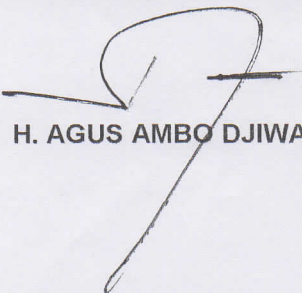
NOMOR : **AI** TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON IV . B	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN			MOBIL DINAS (BAHAN BAKAR)			KENDARAAN UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
						1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc	
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I.	<b>PULAU SULAWESI</b>								
	Mamuju Utara :								
	- Dapurang	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	120.000
	- Sarudu	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	100.000
	- Doripoku	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	100.000
	- Bulu Taba	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	100.000
	- Baras	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	80.000
	- Lariang	117.000	117.000	-	-	-	-	-	75.000
	- Tikke Raya	117.000	117.000	-	-	-	-	-	70.000
	- Pedongga	117.000	117.000	-	-	-	-	-	65.000
	- Pasangkayu	117.000	117.000	-	-	-	-	-	60.000
	- Bambalamotu	117.000	117.000	-	-	-	-	-	65.000
	- Bambaira	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-	70.000
	- Sarjo	117.000	127.500	127.500	-	-	-	-	75.000
	Donggala	150.000	117.500	220.000	215.000	-	-	-	120.000
	Palu	150.000	215.000	350.000	215.000	-	-	-	190.000
	Mamuju	150.000	150.000	350.000	215.000*)	-	-	-	380.000
	Majene	150.000	150.000	270.000	215.000	-	-	-	440.000
	Polman	150.000	150.000	270.000	215.000	-	-	-	470.000
	Mamasa	150.000	150.000	270.000	215.000	-	-	-	470.000
	Pinrang	150.000	150.000	270.000	215.000	-	-	-	500.000
	Makassar	182.500	215.000	445.000	247.500 *)	Real cost	-	-	750.000
	Manado	182.500	215.000	420.000	247.500 *)	Real cost	-	-	1.030.000
	Kendari	182.500	215.000	380.000	247.500 *)	Real cost	-	-	-
	Gorontalo	182.500	215.000	405.000	247.500 *)	Real cost	-	-	900.000
II	<b>JAWA</b>								
	Jakarta	215.000	432.500	490.000	800.000	Real cost	-	-	-
	Surabaya	215.000	432.500	442.500	670.000	Real cost	-	-	-
	Jogjakarta	215.000	432.500	442.500	670.000	Real cost	-	-	-
	Bandung	215.000	432.500	442.500	670.000	Real cost	-	-	-
	Solo	215.000	432.500	442.500	670.000	Real cost	-	-	-
	Bali	215.000	432.500	790.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Lombok	215.000	432.500	442.500	670.000	Real cost	-	-	-
III.	<b>KALIMANTAN</b>								
	Samarinda	215.000	442.500	345.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Palangkaraya	215.000	442.500	345.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Banjarmasin	215.000	442.500	345.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Pontianak	215.000	442.500	345.000	670.000	Real cost	-	-	-
IV	<b>SUMATERA</b>								
	Aceh	215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Medan	215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Batam	215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Palembang	215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
	Lampung	215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
V	<b>MALUKU</b>								
		215.000	442.500	385.000	670.000	Real cost	-	-	-
VI	<b>PAPUA</b>								
		215.000	442.500	395.000	670.000	Real cost	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

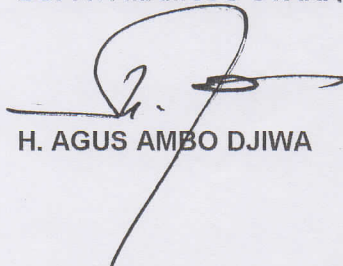
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

ESELON V NON ESELON GOLONGAN IV & III	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN			MOBIL DINAS (BAHAN BAKAR)			KENDARAAN UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
						1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc	
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
J. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	120.000
- Sarudu	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	100.000
- Doripoku	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	100.000
- Bulu Taba	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	100.000
- Baras	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	80.000
- Lariang	107.500	107.500	-	-	-	-	-	-	75.000
- Tikke Raya	107.500	107.500	-	-	-	-	-	-	70.000
- Pedongga	107.500	107.500	-	-	-	-	-	-	65.000
- Pasangkayu	107.500	107.500	-	-	-	-	-	-	60.000
- Bambalamotu	107.500	107.500	-	-	-	-	-	-	65.000
- Bambaira	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	70.000
- Sarjo	107.500	107.500	107.500	-	-	-	-	-	75.000
Donggala	140.000	107.500	210.000	205.000	-	-	-	-	120.000
Palu	140.000	205.000	340.000	205.000	-	-	-	-	190.000
Mamuju	140.000	150.000	340.000	205.000	-	-	-	-	380.000
Majene	140.000	150.000	260.000	205.000	-	-	-	-	440.000
Polman	140.000	150.000	260.000	237.500	-	-	-	-	470.000
Mamasa	140.000	150.000	260.000	205.000	-	-	-	-	470.000
Pinrang	140.000	150.000	260.000	205.000	-	-	-	-	500.000
Makassar	172.500	205.000	435.000	205.000	Real cost	-	-	-	750.000
Manado	172.500	205.000	410.000	205.000	Real cost	-	-	-	1.030.000
Kendari	172.500	205.000	370.000	205.000	Real cost	-	-	-	-
Gorontalo	172.500	205.000	395.000	205.000	Real cost	-	-	-	900.000
II. JAWA									
Jakarta	205.000	422.500	480.000	790.000	Real cost	-	-	-	-
Surabaya	205.000	422.500	432.500	660.000	Real cost	-	-	-	-
Jogjakarta	205.000	422.500	432.500	660.000	Real cost	-	-	-	-
Bandung	205.000	422.500	432.500	660.000	Real cost	-	-	-	-
Solo	205.000	422.500	432.500	660.000	Real cost	-	-	-	-
Bali	205.000	422.500	780.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Lombok	205.000	422.500	432.500	660.000	Real cost	-	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	205.000	432.500	335.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Palangkaraya	205.000	432.500	335.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Banjarmasin	205.000	432.500	335.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Pontianak	205.000	432.500	335.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Medan	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Batam	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Palembang	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
Lampung	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
V. MALUKU	205.000	432.500	375.000	660.000	Real cost	-	-	-	-
VI. PAPUA	205.000	432.500	385.000	660.000	Real cost	-	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

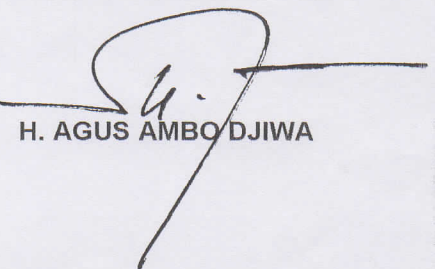
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NON ESELON GOLONGAN II & I	UANG HARIAN			TRANS PORTASI LOKAL	BIAYA TRANS PORTASI UDARA (PP)	TRANSPORTASI DARAT			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINA PAN			MOBIL DINAS (BAHAN BAKAR)			KENDARAAN UMUM / SEPEDA MOTOR
						1.200- 1500 cc	1.501- 2.500 cc	2.501- 5.000 cc	
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I. PULAU SULAWESI									
Mamuju Utara :									
- Dapurang	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	110.000
- Sarudu	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	90.000
- Doripoku	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	90.000
- Bulu Taba	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	90.000
- Baras	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	80.000
- Lariang	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	70.000
- Tikke Raya	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	60.000
- Pedongga	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	55.000
- Pasangkayu	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	50.000
- Bambalamotu	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	55.000
- Bambaira	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	60.000
- Sarjo	84.500	84.500	84.500	-	-	-	-	-	70.000
Donggala	97.500	107.500	162.500	-	-	-	-	-	125.000
Palu	130.000	162.000	195.000	-	-	-	-	-	160.000
Mamuju	130.000	140.000	165.000	-	-	-	-	-	320.000
Majene	97.500	140.000	150.000	-	-	-	-	-	420.000
Polman	97.500	140.000	150.000	-	-	-	-	-	450.000
Mamasa	97.500	140.000	150.000	-	-	-	-	-	450.000
Pinrang	97.500	140.000	150.000	-	-	-	-	-	450.000
Makassar	130.000	162.000	275.000	-	Real cost	-	-	-	645.000
Manado	130.000	162.000	250.000	-	Real cost	-	-	-	970.000
Kendari	130.000	160.000	220.000	-	Real cost	-	-	-	-
Gorontalo	130.000	150.000	250.000	-	Real cost	-	-	-	775.000
II. JAWA									
Jakarta	130.000	325.000	355.000	650.000	Real cost	-	-	-	-
Surabaya	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Jogjakarta	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Bandung	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Solo	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Bali	130.000	325.000	495.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Lombok	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
III. KALIMANTAN									
Samarinda	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Palangkaraya	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Banjarmasin	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Pontianak	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
IV. SUMATERA									
Aceh	130.000	325.000	250.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Medan	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Batam	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Palembang	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
Lampung	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
V. MALUKU	130.000	325.000	260.000	580.000	Real cost	-	-	-	-
VI. PAPUA	130.000	325.000	275.000	580.000	Real cost	-	-	-	-

\*) penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal.

BUPATI MAMUJU UTARA

  
H. AGUS AMBO DJIWA

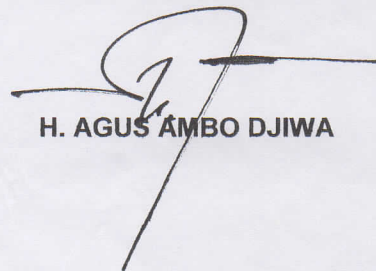
LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

SOPIR	UANG HARIAN			
	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG PENGINAPAN	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I.	<b>PULAU SULAWESI</b>			
	Mamuju Utara :			
	- Dapurang	58.500	80.500	71.500
	- Sarudu	58.500	80.500	60.000
	- Doripoku	58.500	80.500	60.000
	- Bulu Taba	58.500	80.500	55.000
	- Baras	58.500	80.500	50.000
	- Lariang	58.500	80.500	-
	- Tikke Raya	58.500	80.500	-
	- Pedongga	58.500	80.500	-
	- Pasangkayu	58.500	80.500	-
	- Bambalamotu	58.500	80.500	-
	- Bambaira	58.500	80.500	45.000
	- Sarjo	58.500	80.500	55.000
	Donggala	58.500	80.500	97.500
	Palu	104.000	97.500	97.500
	Mamuju	65.000	97.500	97.500
	Majene	84.500	97.500	130.000
	Polman	84.500	97.500	130.000
	Mamasa	84.500	97.500	130.000
	Pinrang	84.500	130.000	130.000
	Makassar	97.500	130.000	195.000
	Manado	104.000	97.500	175.500
	Gorontalo	104.000	130.000	175.500

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA